

Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah di Jawa Timur Tahun 2018-2022

**Aprillia Arum Anggreini¹; Diana Zuhroh²; Tjandra Wasesa³;
Wiratna Wiratna⁴; Sutini Sutini⁵**

Universitas 45 Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Mayjen Sungkono No.106, Pakis, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60256

Corresponding author : aprilliaarum0@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to determine how the influence of local revenue (PAD) and Central Government Transfer revenue on regional spending in East Java in 2018-2023 and how much influence partially or simultaneously. The Data used is secondary data obtained from the official website of the Directorate General of financial balance (DGT). Sampling technique using purposive sampling. The number of samples in this study is 117 normally distributed samples. The analysis used is multiple linear regression analysis, by testing classical assumptions first. The R-Square test is used to test the accuracy of the model. As for the hypothesis test using T test (partial) and F test (simultaneous). Based on the results of research that has been done, local revenue (PAD) and Central Government Transfer revenue respectively have a positive and significant effect on regional spending. Simultaneously or jointly local revenue (PAD) and Central Government Transfer revenue significantly affect regional spending.*

Keywords: *Regional Budget, Local Revenue (PAD), Central Government Transfer Revenue, Regional Spending.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah di Jawa Timur tahun 2018-2023 dan seberapa besar pengaruhnya secara parsial maupun secara simultan. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 117 sampel yang terdistribusi normal. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji R-Square digunakan untuk menguji ketepatan model. Sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan Uji t (parsial) dan Uji F (simultan). Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan atau secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci: APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Belanja Daerah.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah yaitu perwujudan berlakunya implementasi desentralisasi. Pengertian Otonomi daerah itu sendiri merupakan pemberian kebebasan mengatur rumah tangganya, dengan tidak melupakan peran Pemerintah Daerah selaku aparatur yang ditugaskan Pemerintah Pusat dalam bertanggung jawab melaksanakan kegiatan yang diberikan sesuai peraturan undang-undang. Saat ini Pemerintah Daerah serta Pusat bisa bersama-sama memiliki kesempatan untuk memperbaiki serta meningkatnya kualitas pelayanan publik yang sebelumnya terbengkalai.

Untuk mengoptimalkan terwujudnya otonomi daerah, maka diberlakukan adanya perimbangan keuangan. Pada UU No. 1 Tahun 2022, agar tugas Pemerintah Daerah dapat terlaksana, terdapat dana dari Pemerintah Pusat ke Daerah, yang sering disebut Transfer ke Daerah. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat melibatkan dua komponen, yaitu (1) Dana Perimbangan dan (2) Pendapatan Transfer Lainnya dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan terdiri dari, (1) Dana Bagi Hasil, (2) Dana Alokasi Umum, dan (3) Dana Alokasi Khusus. Sementara itu, Pendapatan Transfer Lainnya dari Pemerintah Pusat mencakup (1) Dana Otonomi Khusus dan (2) Dana Keistimewaan Yogyakarta. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan bagaimana hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi agar dapat terwujudnya otonomi daerah.

Penerapan sistem Anggaran di Indonesia hingga saat ini sudah berdasarkan peraturan pemerintah yang tertuang dalam PP nomor 90 Tahun 2010 yaitu menggunakan sistem Anggaran Berbasis Kinerja yang lebih dikenal dengan Performance Based Budgeting yang didefinisikan oleh Mahmudi (2019:4) sebagai "...suatu metode untuk mengukur kemajuan program atau aktivitas yang dilakukan organisasi sektor publik dalam mencapai hasil atau outcome," yang diperlukan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Sistem ini mengutamakan capaian hasil yang berhubungan dengan pekerjaan (output) atas perencanaan distribusi belanja (input), yaitu menitikberatkan pada hubungan antara pembiayaan dengan hasil kerja. Tujuan penyusunan APBD berdasarkan ABK ini adalah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya serta efektivitas penggunaan anggaran sesuai rencana yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah agar anggaran tersebut bisa digunakan secara optimal.

Selain Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sistem perencanaan dan penganggaran di Indonesia juga menganut metode Penganggaran Tak Bersisa atau lebih dikenal dengan Zero Based Budgeting (ZBB). Menurut laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (27 September 2023), Zero Based Budgeting adalah pendekatan penganggaran berbasis nol yang melibatkan alokasi dana pada awal setiap periode anggaran, dengan semua alokasi disusun berdasarkan visi dan rencana program pada periode tersebut.

Atas dasar kedua penerapan sistem di atas peneliti ingin mengetahui apakah hasil kerja berpengaruh terhadap alokasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2018-2022. Terutama pada wilayah Jawa Timur yang Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022 yang disajikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pendapatan Daerah Jawa Timur di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 31,9 triliun, dengan capaian target sebesar 115% atau melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam Rancangan APBD yang sebesar

Rp. 27,6 triliun. Akan tetapi capaian target realisasi pendapatan daerah ini tidak terserap dengan baik dalam belanja daerah pada periode yang sama, yang mana pada tahun 2022 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau biasa dikenal dengan SiLPA tahun sebelumnya mencapai Rp. 4 triliun nilai ini meningkat cukup signifikan sebesar 47,5% jika dibandingkan dengan SiLPA pada tahun 2018 yang sebesar Rp. 2,7 triliun.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) itu sendiri menurut Mahmudi (2019:59) "merupakan selisih lebih dari total penerimaan daerah dikurangi dengan total pengeluaran daerah yang sudah memperhitungkan unsur penerimaan dan pengeluaran dari pos pembiayaan." Dengan adanya nilai SiLPA yang cukup tinggi dapat dianggap sebagai ketidakefisienan manajemen anggaran (Badan Anggaran) dalam menyerap pembiayaan daerah, seperti gagalnya beberapa proyek pemerintah daerah, serta program atau kegiatan pemerintah daerah yang terhenti.

Menurut kedua teori di atas yaitu Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan Anggaran Tak Bersisa (Zero Based Budgeting), Belanja Daerah berkaitan erat dengan adanya Pendapatan Daerah. Pada Provinsi Jawa Timur meskipun Pendapatan Daerah sudah memenuhi target anggaran yang ditetapkan, tetapi pendapatan tersebut tidak terserap dengan baik dalam Belanja Daerah setiap tahunnya karena terlihat dalam persentase SiLPA yang semakin meningkat selama lima (5) tahun terakhir. Atas dasar ini peneliti tertarik mengambil judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah di Jawa Timur tahun 2018-2022."

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Rancangan penyusunan dan prosedur operasional penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah dibuat sesuai Pasal 18 UUD Republik Indonesia 1945, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan operasional dalam mempercepat pelaksanaan terciptanya kesejahteraan masyarakat, mengembangkan lebih lanjut pelayanan administrasi, meningkatkan kemampuan dasar daerah, peran serta masyarakat, dan mendukung masyarakat dengan mengedepankan kesetaraan, keadaan, prinsip demokrasi dan ciri khas daerah dalam sistem NKRI. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengendalikan dan menangani pelaksanaan fungsi pemerintahannya sendiri serta urusan daerah setempat sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku, yaitu UU No. 23 Tahun 2014. Pengertian Otonomi Daerah bagi Ateng Syarifuddin (dalam Ani Sri, 2018:13) yaitu "...mempunyai makna kebebasan atau

kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud atas pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan."

Penyerahan tanggung jawab pemerintah kepada daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi terkait erat dengan penyerahan sumber daya keuangan pemerintah pusat kepada daerah. Persiapan, pelaksanaan, pengurusan, pengelolaan, pengungkapan serta tanggung jawab atas dana daerah adalah aspek-aspek dari manajemen keuangan daerah yang mencakup berbagai jenis kegiatan. Penyelenggaraan keuangan daerah dilakukan dengan tertib dan konsisten sesuai dengan undang-undang, produktif, lugas, transparan dan penuh perhatian dengan berfokus pada rasa keadilan dan keuntungan bagi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diterima oleh daerah dan ditarik berdasarkan aturan daerah terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Pada undang-undang ini dijelaskan juga, selain Dana Perimbangan, Dana Transfer Daerah, dan lain-lain PAD yang sah, Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang digunakan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan Daerah.

Mengacu pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang membahas Perimbangan Keuangan, menjelaskan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga bisa memenuhi seluruh pendanaan daerahnya sendiri, setiap daerah diharuskan mampu untuk meningkatkan pemasukan dana sebanyak-banyaknya yang diharapkan dapat mendukung perekonomian. Pentingnya penyerahan dan pemindahan sumber daya terkait dengan desentralisasi yang diindikasikan oleh pemerintah pusat melalui pemberian kewenangan ke pemerintah daerah.

Berlandaskan UU No. 33 Tahun 2004, menjelaskan PAD berasal dari beberapa jenis sumber, sumber yang dimaksud meliputi :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah komponen untuk belanja negara dimana sumbernya berasal dari APBN sebagai bentuk terlaksananya desentralisasi yang berupa :

1. Transfer Pemerintah Pusat

Terbagi menjadi 3 jenis yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta

Belanja Daerah

Belanja Daerah merujuk pada seluruh biaya yang dikeluarkan dari kas umum daerah tanpa memisahkan pengeluaran tersebut termasuk pengeluaran diperolehnya pendapatan atau pengeluaran pembayaran utang dan pengeluaran untuk modal. Kata "belanja" merujuk pada semua pengeluaran yang dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja Daerah dirancang sesuai dengan basis kas yang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PMK.05 No. 225 Tahun 2019. Jenis-Jenis Belanja Daerah yaitu Belanja Operasi, Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

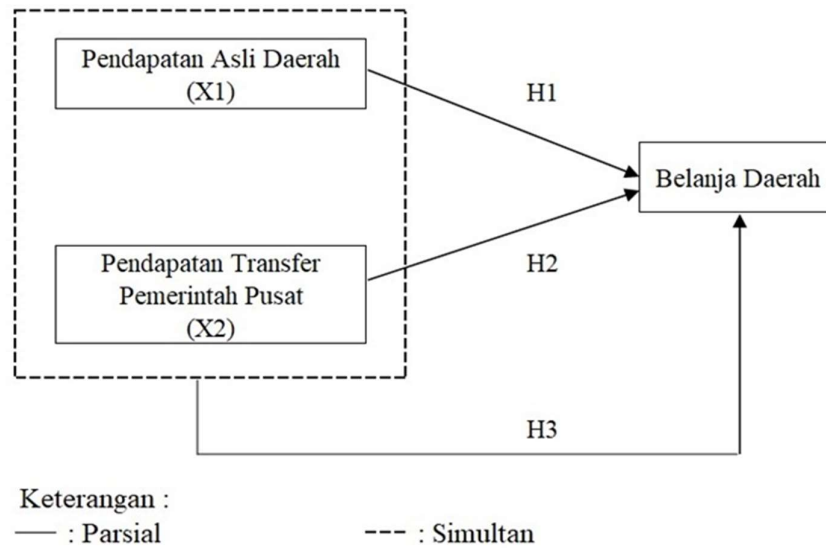
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan prinsip otonomi daerah yaitu desentralisasi sebagai rangka mencapai kemandirian keuangan Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal memaksimalkan potensi sumber-sumber keuangan asli yang dimiliki daerah. Hal ini menggambarkan kemampuan belanja daerah akan mengalami peningkatan ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat, begitu juga jika hal sebaliknya terjadi. Besaran belanja daerah umumnya tergantung pada besarnya pendapatan daerah terutama pendapatan dari sumber-sumber asli daerah tersebut.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Daerah

Dana ini terdiri dari dana perimbangan dan transfer lainnya yang berasal dari APBN, dirancang dalam rangka menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah serta membiayai pengeluaran yang terkait dengan implementasi desentralisasi. Sehingga Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dalam melaksanakan fungsi aktivitas umum maupun aktivitas khusus daerah lainnya. Artinya jika pendapatan transfer dari pemerintah pusat meningkat, maka belanja daerah juga akan meningkat pada satu periode yang sama. Begitu juga sebaliknya jika pendapatan transfer dari pemerintah pusat turun, maka belanja daerah juga akan menurun pada satu periode yang sama.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Sumber : data diolah, 2023

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82) Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28)

3. METODE PENELITIAN

Model Analisis Data

Model analisis data mengacu pada metode sistematis yang dipergunakan sebagai pengolah, analisis, dan penginterpretasi data. Model ini membantu dalam menyusun langkah sistematis. Bisa disimpulkan bahwa analisis ini merupakan metode statistik yang bermanfaat untuk memahami hubungan variabel terikat dengan variabel bebas yang berjumlah dua atau lebih.

Berdasarkan data rasio dan adanya dua variabel bebas pada penelitian ini, maka model analisis data yang dipergunakan yaitu analisis regresi khususnya analisis linier berganda. Analisis ini diperlukan untuk membuktikan seberapa jauh pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah. Dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Belanja Daerah
 X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 X2 : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 α : Konstanta
 $\beta_1 - \beta_2$: Koefisien regresi
 e : Faktor Galla

Melalui analisis ini, peneliti bisa mengetahui bagaimana hubungan antar variabel serta membuat perkiraan berdasarkan nilai-nilai variabel bebas yang diberikan.

Uji Hipotesis

Uji ini merupakan prosedur statistik yang dipergunakan dalam pembuatan keputusan mengenai pernyataan hipotesis tentang parameter populasi berdasarkan sampel. Untuk membuktikan hipotesis yang disusun tersebut, maka dapat diukur dengan menggunakan uji hipotesis, yaitu :

a. Uji Parsial (Uji t)

Pada Penelitian ini, mengaplikasikan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, atau tingkat kesalahan 5%, yang berarti bahwa kebenaran yang memungkinkan dari hasil kesimpulan memiliki tingkat kepercayaan 95%. Dengan ukuran dasar pengambilan keputusan H_0 ditolak apabila signifikansi t kurang dari 0,05, dan H_0 diterima apabila signifikansi t lebih dari 0,05.

b. Uji Simultan (Uji F)

Dalam penelitian ini, nilai tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, atau tingkat kesalahan 5%, yang berarti bahwa kebenaran yang memungkinkan dari hasil kesimpulan yang ditarik memiliki tingkat kepercayaan 95%. Dengan ukuran dasar pengambilan keputusan menunjukkan bahwa H_0 ditolak apabila signifikansi F kurang dari 0,05, dan H_0 diterima apabila sig. F lebih besar dari 0,05.

c. Uji R-Square (Koefisien Determinasi/R²)

Uji ini dipergunakan untuk menentukan seberapa jauh variabel bebas bisa mempengaruhi variabel terikat. Koefisien determinasi bernilai di antara nol sampai satu (0-1), bila nol berarti variabel bebas tidak memengaruhi variabel bebas sama sekali. Sebaliknya, bila nilainya mendekati satu, berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

4. PEMBAHASAN

Analisis Model dan Pengujian Hipotesis

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah syarat utama yang wajib dilakukan pada saat akan melakukan pengujian analisis regresi linier berganda. Hal ini agar dapat mengetahui apakah pada penelitian ini model regresi yang dipergunakan telah layak untuk dilakukan pengujian atau tidak.

a. Uji Normalitas

Analisis grafik probability plot adalah cara yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini dengan melihat atau mengamati titik-titik plotting hasil uji SPSS yang tersebar, apakah berada didekat garis diagonalnya (terdistribusi normal) atau justru menjauhi garis diagonalnya (tidak terdistribusi normal).

Pada saat dilakukan uji normalitas didapatkan hasil nilai residual tidak terdistribusi normal dalam model regresi. Terutama yaitu pada 8 Data Laporan Realisasi APBD yang tidak terdistribusi normal, sehingga harus dilakukan pemangkasan data atau pemotongan data. Dari 125 sampel yang telah ditentukan hanya 117 sampel yang akhirnya digunakan agar data yang dihasilkan dapat terdistribusi dengan normal dalam model regresi.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas berguna untuk menganalisis korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik mestinya tidak terjadi adanya korelasi diantara variabel bebas.

Pada hasil Uji Multikolinieritas yang dilakukan didapatkan hasil :

- Nilai Toleransi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) sebesar $0,609 > 0,100$. Artinya nilai toleransi 0,609 lebih besar atau di atas 0,100 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya multikolinieritas.
- Nilai Toleransi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (X2) sebesar $0,609 > 0,100$. Artinya nilai toleransi 0,609 lebih besar dari 0,100 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya multikolinieritas.
- Nilai VIF Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) sebesar $1,642 < 10,00$. Yang berarti nilai VIF 1,642 lebih kecil atau di bawah 10,00 memperlihatkan bahwa tidak terjadi adanya multikolinieritas.
- Nilai VIF Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (X2) sebesar $1,642 < 10,00$. Yang berarti nilai VIF 1,642 lebih kecil dari 10,00 yang artinya tidak terdapat adanya multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Model regresi dianggap baik bila dalam model regresi bebas dari autokorelasi. Jika terjadi adanya korelasi, maka artinya terjadi problem autokorelasi. Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson berdasarkan ketentuan berikut :

Tabel 4.1. Ketentuan Nilai Durbin-Watson (DW)

Deteksi Autokorelasi Positif:	
Jika $dw < dL$	Terdapat autokorelasi positif.
Jika $dw > dU$	Tidak terdapat autokorelasi positif.
Jika $dL < dw < dU$	Pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.
Deteksi Autokorelasi Negatif:	
Jika $(4 - dw) < dL$	Terdapat autokorelasi negatif.
Jika $(4 - dw) > dU$	Tidak terdapat autokorelasi negatif.
Jika $dL < (4 - dw) < dU$	Pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

Sumber : data diolah, 2024

Dengan hasil pengujian menggunakan SPSS didapatkan hasil berikut ini :

Tabel 4.2. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^D					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.990 ^a	0.979	0.979	0.02528	1.842
a. Predictor: (Constant), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
b. Dependent Variable: Belanja Daerah					

Sumber : data diolah oleh SPSS, 2024

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi diketahui Durbin-Watson (dw) sebesar 1,8420. Nilai ini akan dilakukan perbandingan dengan nilai tabel alpha 5%, dengan jumlah sampel (n) sebanyak 117 serta jumlah variabel bebas sebanyak 2 ($k=2$), sehingga didapatkan nilai dari tabel dw alpha 5% yaitu $dL=1,6638$ dan $du=1,7332$. Dari nilai dw yang sebesar 1,8420, bisa disimpulkan bahwa :

- $dw > dU = 1,8420 > 1,7332$, artinya tidak terjadi autokorelasi positif.
- $(4 - dw) > dU = (4 - 1,8420) > 1,7332 = 2,1580 > 1,7332$, artinya tidak terjadi autokorelasi negatif.

Sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif atau tidak terjadi adanya autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan pengujian menggunakan analisis output scatterplot SPSS bisa diketahui bahwa :

- Titik-titik data tersebar di atas dan di bawah atau berada di sekitar angka 0.
- Titik-titik tidak terpusat pada beberapa tempat hanya berada di atas atau di bawah saja.

- Sebaran titik-titik data tidak berbentuk pola gelombang yang meluas lalu menyempit dan meluas kembali.
- Sebaran titik-titik tidak mempunyai pola.

Dengan penjelasan diatas bisa diartikan bahwa tidak terjadi adanya heteroskedastistas, sehingga model regresi yang baik bisa terpenuhi.

Uji Ketepatan Model

Uji R-Square (Koefisien Determinasi/R²)

Berikut ini merupakan hasil dari Uji R-Square dengan menggunakan alat bantu program SPSS.

Tabel 4.3. Hasil Uji R-Square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 ^a	0.979	0.979	0.02528
a. Predictor: (Constant), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
b. Dependent Variable: Belanja Daerah				

Sumber : data diolah oleh SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui hasil R-Square sebesar 0,979 atau 97,9%, artinya bahwa variabel bebas Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah di Jawa Timur pada tahun 2018-2022 dengan pengaruh sebesar 97,9%. Sedangkan 2,1% sisanya (100%-97,9% = 2,1%) disebabkan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yaitu analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk melakukan pengujian hipotesis yang sudah diajukan.

Tabel 4.4. Hasil Uji t (Analisis Regresi Linier Berganda)

Model		Unstandaridized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.180	.165		1.087	0.279
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	.205	.014	.253	14.590	0.000
	Pemerintah Pusat	.803	.017	.812	46.864	0.000
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						

Sumber : data diolah oleh SPSS, 2024

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Sehingga hasil dari pengujian yang sudah dilakukan, didapatkan persamaan seperti berikut :

$$Y = 0,180 + 0,205.X_1 + 0,803.X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Belanja Daerah
 X_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 X_2 : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 α : Konstanta
 $\beta_1 - \beta_2$: Koefisien regresi
e : Faktor Galla

Dari hasil persamaan di atas, maka bisa diartikan bahwa:

- Berdasarkan hasil hitung di atas diketahui bahwa konstanta Y sebesar 0,180, artinya bahwa jika variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (X_2) sama dengan 0 (nol), maka nilai Belanja Daerah akan bernilai sebesar 0,180.
- Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) didapatkan hasil sebesar 0,205 dengan koefisien positif, yang artinya setiap Pendapatan Asli Daerah (X_1) meningkat 1 satuan, maka Belanja Daerah juga akan meningkat sebesar 0,205 (diasumsikan variabel lainnya konstan).
- Nilai koefisiensi variabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (X_2) didapatkan hasil sebesar 0,803 dengan koefisien positif, yang artinya setiap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (X_2) meningkat 1 satuan, maka Belanja Daerah juga akan meningkat sebesar 0,803 (diasumsikan variabel lainnya konstan).

Uji Hipotesis

Uji F

Uji ini digunakan agar bisa mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikatnya.

Tabel 4.5. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.424	2	1.712	2679.236	.000 ^b
	Residual	0.073	114	0.001		
	Total	3.497	116			

Sumber : data diolah oleh SPSS, 2024

Uji F dilakukan dengan melakukan perbandingan nilai F hasil pengujian dengan nilai F tabel. Pada tabel di atas bisa diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 2.679,236. Sedangkan nilai F_{tabel} diperoleh dari tabel F dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (tingkat kesalahan 5%). Derajat bebas (df) yaitu :

- $df(N1) = k$ (jumlah variabel bebas)

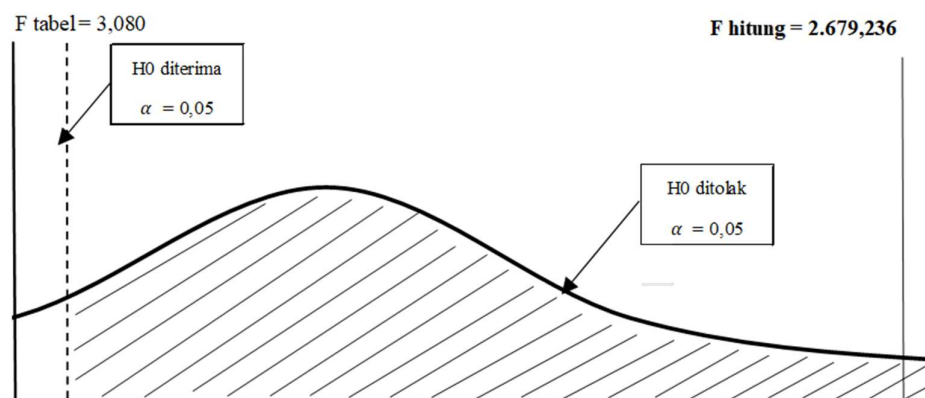
= 2

- $df(N2) = n \text{ (sampel)} - k \text{ (jumlah variabel bebas)} - 1$
 $= 117 - 2 - 1$
 $= 114$

Diperoleh hasil $F_{\text{tabel}} (0,05 ; 2 ; 114)$ sebesar 3,080, maka :

- a. Nilai F_{tabel} sebesar 3,080, sehingga bisa diketahui nilai $F_{\text{hitung}} (2.679,236) > F_{\text{tabel}} (3,080)$, yang artinya seluruh variabel bebas (X_1, X_2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
- b. Nilai Signifikansi dari dilakukannya uji F ini sebesar $0,000 < \text{tingkat signifikansi}$ yang sebesar 0,050, yang artinya kedua variabel bebas (X_1, X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Jawa Timur pada tahun 2018-2022.

Untuk lebih jelas bisa dilihat pada kurva regresi uji F berikut :



Gambar 4.1. Kurva Regresi Uji F (Simultan)

Sumber : data diolah, 2024

Dari kurva regresi uji F diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} yaitu $2.679,236 > 3,080$, maka H_0 ditolak. Artinya secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (X_2) memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah (Y) di Jawa Timur tahun 2018-2022.

Uji t

Setelah dilakukannya uji F, maka langkah berikutnya adalah pengujian hipotesis uji t untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Tabel 4.6. Hasil Uji t

Coefficients^a						
Model		Unstandaridized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.180	.165		1.087	0.279
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	.205	.014	.253	14.590	0.000
	Pemerintah Pusat	.803	.017	.812	46.864	0.000
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						

Sumber : data diolah oleh SPSS, 2024

Berdasarkan hasil pengujian (uji t) di atas, bisa diketahui :

- Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) yaitu sebesar 0,205 dengan koefisien positif, maka bisa disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (Y) di Jawa Timur pada tahun 2018-2022. Pengaruh positif berarti dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (X_1), maka Belanja Daerah (Y) juga semakin meningkat.
- Koefisien regresi variabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (X_2) yaitu sebesar 0,803 dengan koefisien positif, maka bisa disimpulkan bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (X_2) berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah (Y) di Jawa Timur pada tahun 2018-2022. Artinya dengan semakin meningkatnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (X_2), maka Belanja Daerah (Y) juga akan semakin meningkat.

Uji t dapat dikatakan lolos apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi (Sig.) < tingkat signifikansi (0,050). Nilai t_{tabel} dapat diketahui dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 t_{tabel} &= (\alpha/2 ; n - k - 1) \\
 &= (0,05/2 ; 117 - 2 - 1) \\
 t_{tabel} &= (0,025 ; 114)
 \end{aligned}$$

Keterangan :

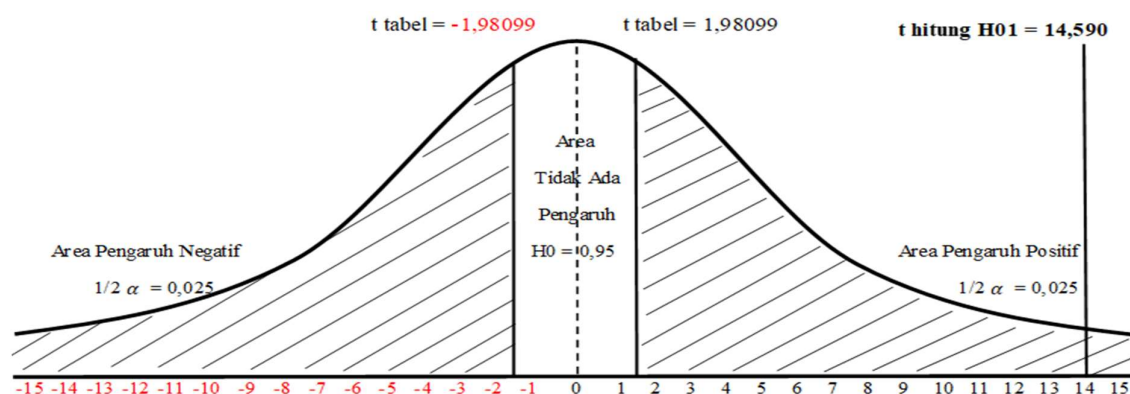
- α : Sig. (0,05)
 n : Jumlah Sampel
 k : Jumlah Variabel Bebas

Nilai 0,025 dan 114 inilah yang digunakan sebagai acuan pencarian pada distribusi nilai t_{tabel} , sehingga didapatkan nilai t_{tabel} sebesar 1,98099. Maka :

- Dari hasil analisis regresi diketahui hasil t_{hitung} Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 14,59000 > t_{tabel} sebesar 1,98099. Nilai signifikansi (Sig.) Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0,000 < tingkat signifikansi 0,050. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

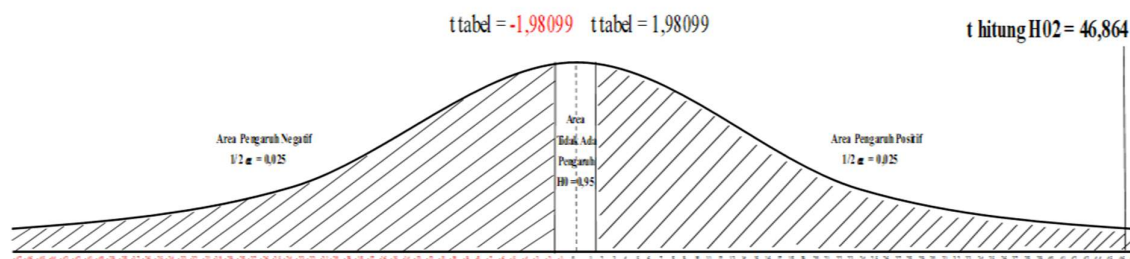
- b. Dari hasil analisis regresi, diketahui bahwa hasil t_{hitung} Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (X_2) sebesar $46,86400 > t_{tabel}$ sebesar $1,98099$. Nilai signifikansi (Sig.) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (X_2) sebesar $0,000 < \text{tingkat signifikansi } 0,050$. Artinya variabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

Untuk lebih jelas bisa dilihat pada kurva regresi uji t di bawah ini :



Gambar 4.2. Kurva Regresi Uji t (Parsial, Dua Arah) H_{01}

Sumber : data diolah, 2024



Gambar 4.3. Kurva Regresi Uji t (Parsial, Dua Arah) H_{02}

Sumber : data diolah, 2024

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Dari penelitian yang sudah dilakukan, bisa diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Jawa Timur pada tahun 2018-2022. Yang artinya jika terdapat peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Belanja Daerah juga akan mengalami kenaikan. Dilihat dari hasil uji t didapatkan hasil koefisien positif pada variabel Pendapatan Asli Daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar $0,205$ atau sebesar $20,5\%$, yang artinya jika setiap Pendapatan Asli Daerah meningkat 1 satuan, maka Belanja Daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar $20,5\%$ (diasumsikan variabel lainnya konstan).

Pengaruh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Jawa Timur pada tahun 2018-2022. Artinya jika terdapat peningkatan pada Pendapatan

Transfer Pemerintah Pusat maka Belanja Daerah juga akan meningkat. Jika dilihat dari hasil uji t menunjukkan hasil koefisien positif pada variabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan nilai koefisien regresi yang cukup tinggi sebesar 0,803 atau sebesar 80,3%, artinya jika setiap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami peningkatan 1 satuan, maka Belanja Daerah juga akan mengalami peningkatan sebesar 80,3% (diasumsikan variabel lainnya konstan).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Secara Simultan Terhadap Belanja Daerah

Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Jawa Timur pada tahun 2018-2022. Yang artinya Belanja Daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Pada Tabel hasil Uji R-Square diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,979 atau 97,9%. Artinya kedua variabel bebas yang diteliti merupakan faktor penting terhadap besar kecilnya variabel terikat (Belanja Daerah).

Pembuktian Hipotesis

a. Uji t (X1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menghasilkan Sig. (p) 0,000, dan besarnya R-Square 0,979.

$$0,000 < 0,979$$

$$t_{hitung} (X1) 14,59000 > t_{tabel} 1,98099$$

Didapatkan hasil nilai sig. lebih kecil bila dibandingkan nilai R-Square, artinya pada penelitian ini terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah yaitu sebesar 0,979 atau 97,9%. Sehingga hipotesis (H_{01}) yang berbunyi “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.” diterima.

b. Pada uji t (X2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Menghasilkan Sig. (p) 0,000, dan besarnya R-Square 0,979.

$$0,000 < 0,979$$

$$t_{hitung} (X2) 46,86400 > t_{tabel} 1,98099$$

Artinya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap Belanja Daerah sebesar 97,9%. Sehingga hipotesis (H_{02}) yang berbunyi

“Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.” diterima.

c. Uji F Regresi

Menghasilkan Sig. (p) 0,000, dan besarnya R-Square 0,979. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

$$0,000 < 0,979$$

$$F_{hitung} 2.679,236 > F_{tabel} 3,080$$

Hal ini artinya terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah, yaitu sebesar 0,979 atau 97,9%. Sehingga hipotesis (H_{03}) yang berbunyi “Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah” diterima. Kerja sama antara pemerintah, industri, lembaga penelitian dan masyarakat sipil dalam merancang menerapkan, Komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan upaya - upaya tersebut. (Gazali Salim et al. 2024 : 63) The SERVQUAL model includes calculating the difference between the values given by customers for each pair of statements related to expectations and perceptions (Diana Zuhro et al. 2024 : 98) In addition, mortgage business also becomes a funding solution for the community, breaking the practice of debt bondage and avoid the moneylenders' circle. (Diana Zuhro et. Al 2018 : 397)

5. KESIMPULAN

- 1) Hasil uji hipotesis secara parsial didapatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Terlihat dari uji t yang dilakukan didapatkan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $14,59000 > 1,98099$ dan Sig. $0,000 < 0,050$.
- 2) Hasil uji hipotesis secara parsial tampak bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap Belanja Daerah. Terlihat dari uji t yang dilakukan didapatkan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $46,86400 > 1,98099$ dan Sig. $0,000 < 0,050$.
- 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah variabel yang paling berpengaruh pada penelitian ini dan juga mendominasi dengan presentase 80,3% yang bisa dilihat pada tabel uji t.
- 4) Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Terlihat dari hasil uji F yang dilakukan didapatkan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $2.679,236 > 3,080$ dan Sig. $0,000 < 0,050$.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Z., et al. (2018, December). Performance of Active Customers Number PT Pegadaian Indonesia Period 2011 - 2016, Jurnal MIMBAR, Universitas Islam Bandung, 34(2):397 - 405
- Diana, Z., et al. (2024, July). Impact Of Measurement Of Service Quality Using The Servqual Method, Digital Innovation : International Journal of Management 1(3): 94-114
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. *Realisasi APBD 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieve from: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2019. *Realisasi APBD 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieve from: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2020. *Realisasi APBD 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieve from: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2021. *Realisasi APBD 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieve from: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2022. *Realisasi APBD 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieve from: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Dwi., Mahfud. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual edisi kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Fitriani, Y., & Hendaris, R.B. (2023). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi'45 4(1): 151-160.
- Gazali, S., et al. (2024). Ikan Nomei, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pages : 1 - 98
- Halim, A., Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah edisi keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, A.T., et al. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Sorot Jurnal UNRI 17(1): 41-57.
- Kristiawati, et al. (2019, September). Citra Merek Persepsi Harga dan Nilai Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mini Market Indomaret Lontar Surabaya. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM 17) 6(2): 27- 36.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah edisi keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM. YKPN.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan edisi revisi 2013*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik edisi pertama*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Nailufar, F., & Sufitrayati. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh*. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis 10(1): 83-103.
- Rahayu, A.S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2023. *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah Komparasi*. Retrieve from: <https://setkab.go.id/sistem-perencanaan-pembangunan-nasional-amerika-serikat-dan-indonesia-sebuah-komparasi/>
- Sholeh, A.A. et al. (2024, January). Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, Journal Of Management and Creative Business 2(1): 82 - 96
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual) edisi kedua*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Soesilo, T.D. (2019). *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*. Salatiga: Satya Wacana University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif cetakan kedua*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- (n.d). Pasal 18 UUD Tahun 1945 tentang *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- (n.d).Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160-163/PMK.07 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Dana Insentif Daerah*.
- (n.d).Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05 Tahun 2019 jo PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- (n.d).Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- (n.d).Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang *Penyusunan Anggaran di Indonesia*.
- (n.d).Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Transfer ke Daerah*
- (n.d).Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- (n.d).Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- (n.d).Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Belanja Daerah*.
- (n.d).Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- (n.d).Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.